

## **PERBANDINGAN SISTEM KETATANEGARAAN PERSEPEKTIF PENERAPAN HUKUM INDONESIA DAN SINGAPURA**

**Hendra Irawan, Choirul Salim, Destalia Endyta Putri, Nur Kholis**

Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia

E-mail : [hendrainirawan@metrouniv.ac.id](mailto:hendrainirawan@metrouniv.ac.id)

[schorulsalim@gmail.com](mailto:schorulsalim@gmail.com) [destaliaendytap31@gmail.com](mailto:destaliaendytap31@gmail.com) [kholisjunior07@gmail.com](mailto:kholisjunior07@gmail.com)

**Abstract :** state administrative system is a matter related to the state in terms of the structure, position and composition of state institutions with regard to their duties and functions and even their authority which aims to maintain the stability of the state itself. similarities or differences in one country and even many countries, because each country has its own form of government. Here the researcher compares two countries, namely Indonesia and Singapore with this research method using Library Research. As a result, the Indonesian state has similarities in the form of government, namely a republic, besides that it also has similarities in the party system, namely multi-party while the difference is in the Indonesian presidential system of government while Singapore is presidential. Not only that, Indonesia, Singapore, has three powers, namely the executive, legislative and judiciary, but the institutions within it are different.

**Keywords :** Comparison, Government, Indonesia, Singapore

**Abstrak :** Sistem ketatanegaraan merupakan suatu hal yang berkaitan dengan negara dari segi struktur, kedudukan maupun susunan lembaga negara berkenaan dengan tugas dan fungsinya bahkan wewenangnya yang bertujuan menjaga kesetabilan negara itu sendiri, perbandingan sistem ketatanegaraan adalah membandingkan dua negara atau lebih dalam hal sistem pemerintahan atau lainnya untuk menemukan persamaan maupun perbedaan dalam satu negara bahkan banyak negara, karena di setiap negara memiliki bentuk pemerintahannya sendiri. Disini peneliti membandingkan dua negara yaitu Indonesia dan Singapura dengan metode Penelitian ini menggunakan Library Research (Studi Kepustakaan). Hailnya Negara Indonesia memiliki persamaan dalam bentuk pemerintahan yaitu republik

selain itu juga memiliki kesamaan dalam sistem kepartaian yaitu multipartai adapun perbedaannya yaitu pada sistem pemerintahan Indoensia presidensial sedangkan Singapura presidensial. Tidak hanya itu indonesia singapura sama-sama terdapat tiga kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif namun lembaga yang berada didalamnya berbeda.

**Kata Kunci** : Perbandingan, Pemerintahan, Indonesia, Singapura.

## **A. Pendahuluan**

Sistem ketatanegaraan merupakan suatu hal yang berkaitan dengan negara dari segi struktur, kedudukan maupun susunan lembaga negara berkenaan dengan tugas dan fungsinya bahkan wewenangnya yang bertujuan menjaga kesetabilan negara itu sendiri, sedangkan untuk perbandingan sistem ketatanegaaan adalah membandingkan dua negara atau lebih dalam hal sistem pemritahan atau lainnya umtuk menemukan persamaan maupun berbedan dalam satu negara bahkan banyak negara, karena disetiap negara memiliki bentuk pemerintahannya sendiri.<sup>1</sup>

Sistem pemerintahan menurut Sri Soemantri merupakan sebuah sistem hubungan antar organ legiskatif. Dan setelahnya Sri Soemantri mengatakan lagi jika sistem pemerintahan adalah sistem hubungan kekuasaan antar lembaga negara.<sup>2</sup> Disetiap negara demokrasi sistem yang dianut adalah sistem presidensial atau parlementer. Sama halnya di indonesia yang merupakan negara demokrasi sistem yang diatur adalah sistem presidensial, yang menggunakan pemisahan kekuasaan yang disebut trias politika yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif.<sup>3</sup> lantas bagaiman dengan singapura ?

Singapura merupakan negara demokrasi sama dengan indonesia hanya saja sistem pemerintahan di singapura menggunakan sistem parlementer. Di negara Singapura Kepala negara singapura adalah presiden. Pemerintahan dijalankan kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Sperti di negara lain, ada tiga cabang pemisahan kekuasaan pemerintahan yaitu eksekutif, legislatif dan juga

---

<sup>1</sup> Dr. rer.pol. Mada Sukmajati dan Muhammad Mahsum, *Metodelogi Perbandingan Pemerintahan.*, t.t.

<sup>2</sup> Sunarto, "Prinsip cheks and balances dalam system ketatanegaraan Indonesia, masalah-masalah hukum.," t.t., <https://doi.org/10.14710/mmh.45.2.2016.175-163>.

<sup>3</sup> Ahmad Yani, *System Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teri Dan Praktik Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945.*, vol. 12 (2018, t.t.), hlm. 5.

yudikatif, namun bukan berarti ada pemisahan di negara singapura.<sup>4</sup>

Disini penulis akan membandingkan dua negara tersebut yaitu indonesia dan juga singapura yang memiliki perbedaan dan juga persamaan dalam sistem ketatanegaraannya.

## **B. pemahaman**

### **1. Sistem Pemerintahan Di Indonesia**

Indonesia adalah Negara berkembang yang memiliki banyak partai yang sistem pemerintahannya parlementer dan bentuk pemerintahan Republik. Indonesia adalah negara yang menganut pemisahan kekuasaan yang dipengaruhi oleh Jhon locke. Jhon locke mengemukakan tiga kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif dan federatif yang mana disebut dengan trias politika. Trias politika adalah sebuah prinsip bahwa kekuasaan sebagiknya tidak diserahkan terhadap orang yang sama agar mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Indonesia sebagai negara demokrasi yang menerapkan teori trias politika atau pembagian kekuasaan pemerintahan menjadi tiga yang kedudukannya sejajar, yaitu :

#### **1. Legislatif**

Legislatif atau disebut dewan perwakilan rakyat merupakan bidang yang memiliki tugas untuk membuat undang-undang.

Dewan perwakilan rakyat memiliki kedudukan sebagai lembaga negara yang anggotanya berasal dari partai politik peserta pemilu. DPR berkedudukan di tingkat pusat, sedangkan yang ditingkat provinsi yaitu DPRD. Adapun fungsi DPR sebagai lembaga legislatif yaitu fungsi legislasi ( pembuat undang-undang), fungsi anggaran ( menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), serta fungsi pengawasan ( melakukan pengawasan terhadap pemerintahan dalam menjalankan undang-undang) .

#### **2. Eksekutif**

Eksekutif adalah bidang yang bertugas untuk melaksanakan undang-undang, bidang eksekutif yaitu peresiden, wakil presiden dan menteri yang membantu.

---

<sup>4</sup> Ryane Jasmine, "Sistem Pemerintahan Singapura," t.t., [https://www.academia.edu/17760740/sistem\\_pemerintahan~\\_singapura](https://www.academia.edu/17760740/sistem_pemerintahan~_singapura).

Presiden merupakan lembaga yang memegang kekuasaan eksekutif yang memiliki kekuasaan menjalankan pemerintahan dan juga memiliki kedudukan sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Presiden sendiri memiliki masa jabatan selama 5 tahun dan boleh dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Pemilihan presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum.

### 3. Yudikatif

Yudikatif memiliki wewenang menafsirkan isi undang-undang dan memberikan sanksi disetiap pelanggaran, adapun lembaga yudikatif yaitu :

#### a. Mahkamah Agung

Mahkamah Agung adalah peradilan kasasi yang memiliki tugas membina keseragaman dalam penerapan hukum dan menjaga semua hukum dan undang-undang agar hukum ditetapkan secara tepat dan adil serta memiliki sifat yang netral.

#### b. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang memiliki wewenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final. Mahkamah konstitusi juga memiliki kewajiban memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan wakil presiden diduga melakukan pelanggaran hukum yaitu penghiatan kepada negara, korupsi, melakukan suap, melakukan perbuatan tercela dan melakukan tindak pidana.

#### c. Komisi Yudisial

Komisi yudisial adalah lembaga yang memiliki kekuasaan yudikatif. Dalam komisi yudisial ini tidak memiliki kekuasaan kehakiman, tetapi memiliki wewenang mengusulkan personalia hakim berupa pengajuan calon hakim agung kepada DPR yang berkenaan dengan pengangkatan hakim agung. Komisi ini juga memiliki wewenang untuk menjaga, menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.

## 1. Sistem Pemerintahan Singapura

**Singapura adalah negara yang menjadi pusat perhatian karena keunikannya. Singapura terletak di asia tenggara yang dipimpin oleh etnis tionghoa yang memiliki**

**penduduk sebanyak lima juta lebih yang memiliki kontribusi yang sangat signifikan dalam pembagunana bangsa ASEAN. Singapura sebagai negara demokrasi yang pemerintahannya berbentuk republik parlementer yanag mana kepala negaranya<sup>5</sup>**

dipegang oleh presiden dan kepala pemerintahannya dipegang oleh perdana menteri. Sedikit berbeda dengan indonesia untuk pemilihan presiden di singapura dipilih oleh rakyat langsung setiap enam tahun sekali. Terkait dengan partai di singapura menggunakan sistem multipartai sama halnya dengan indonesia.<sup>6</sup> Sama dengan indonesia singapura juga terdapat tiga kekuasaan yaitu :

### 1. Badan Eksekutif di Singapura

Badan Esekutif di Singapura berada ditangan perdana menteri yang ditunjuk oleh presiden. Perdana menteri disini memimpin kabinet secara tanggung jawab dan juga kolektif kepada parlemen. Presiden akan mengangkat menteri dengan rekomendasi dari perdana menteri. Sedangkan anggota kabinet yang dikenal dengan menteri diangkat oleh presiden atas saran perdana menteri. Kabinet membentuk sebuah kekuasaan eksekutif serta bertanggung jawab kepada parlemen. Kabinet singapura secara kolektif memutuskan sebuah kebijakan pemerintah dan memiliki pengaruh pembuatan hukum dengan mengajukan rancanagannya.

### 2. Badan Legislatif di Singapura

Badan legislatif di Singapura berada ditangan parlemen singapura dengan presiden sebagai kepala. Tugas parlemen legislatif singapura yaitu mengundang undang-undang yang mengatur negara. Proses pembuatan undang-undang dimulai dengan rancangan undang-undang.yang disusun oleh pejabat hukum pemerintah. Rancangan undang-undang yang bersifat private members sangat jarang di singapura. Selama diskusi parlemen dalam RUU yang penting para menteri melakukan pidato atau persentasi yang mengesankan agar dapat mempertahankan RUU tersebut. Anggota parlemen dapat memutuskan untuk menyerahkan RUU dalam suatu komite khusus agar membahas dengan seksama dan melaporkan hasil kepada parlemen. Jika RUU dinilai baik maka RUU diterima dan disetujui oleh parlemen.

### 3. Badan Yudikatif di Singapura

Kekuasaan penuh peradilan dilaksanakan oleh mahkamah angung serta peradilan dibawahnya oleh konstitusi singapura. Pengadilan terdiri dari dua yaitu peradilan banding

---

<sup>5</sup> Asto Tetepa, "Indonesia Singapura.," t.t., [https://Www.Academia.Edu/11922957/Indonesia\\_Singapura](https://Www.Academia.Edu/11922957/Indonesia_Singapura).

merupakan liahn banding criminal dan sipil yurisdiksi dan peradilan tinggi merupakan pengadilan asli dan banding yurisdiksi pidana dan perdata. Hakim ketua, hakim banding, komisariss yudisial dan hakim pengadilan tinngi direkomendasikan oleh perdana menteri dan ditunjuk oleh presiden. <sup>6</sup>

### **Pembandingan Sistem Pemerintahan Indonesia dan Singapura**

<b>Pembandingan</b>	<b>Indonesia</b>	<b>Singapura</b>
Sistem pemerintahan	Presidensial	Parlementer
Bentuk pemrintahan	Republik	Republik
Sistem kepartaian	Multipartai	Multipartai
Badan eksekutif	Presiden, wakil presiden	Perdana metri
Badan legislatif	MPR, DPR, DPD	Parlmen
Badan yudikatif	MA, MK, KY	Mahkamah Agung Serta Peradilan Dibawahnya Oleh Konstitusi Singapura

#### **1. Kesimpulan**

**Indonesia adalah Negara berkembang yang memiliki banyak partai yang sistem pemerintahannya parlementer dan bentuk pemerintahan Republik. Indonesia adalah negara yang menganut pemisahan kekuasaan yang dipengaruhi oleh Jhon locke. Jhon locke mengemukakan tiga kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif dan federatif yang mana disebut dengan trias politika. Trias politika adalah sebuah prinsip bahwa kekuasaan sebagiknya tidak diserahkan terhadap orang yang sama agar mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Indonesia sebagai negara demokrasi yang menerapkan teori trias politika atau pembagian kekuasaan pemerintahan menjadi tiga yang kedudukannya sejajar yaitu :**

##### **a. Legislatif**

Legislatif atau disebut dewan perwakilan rakyat merupakan bidang yang memiliki tugas untuk membuat undang-undang. Lembaga legislatif yaitu DPR, MPR, DPD.

##### **b. Eksekutif**

Eksekutif adalah bidang yang bertugas untuk melaksanakan undang- undang,

<sup>6 28</sup> Abdul Rani Usman, hlm. 30.

bidang eksekutif yaitu peresiden, wakil presiden dan menteri yang membantu.

Presiden merupakan lembaga yang memegang kekuasaan eksekutif yang memiliki kekuasaan menjalankan pemerintahan dan juga memiliki kedudukan sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan.

c. Yudikatif

Yudikatif memiliki wewenang menafsirkan isi undang-undang dan memberikan sanksi disetiap pelanggaran, adapun lembaga yudikatif yaitu MA, MK, KY. Singapura adalah negara yang menjadi pusat perhatian karena keunikannya. Singapura terletak di asia tenggara yang dipimpin oleh etnis tionghoa yang memiliki penduduk sebanyak lima juta lebih yang memiliki kontribusi yang sangat signifikan dalam pembagunana bangsa ASEAN. Singapura sebagai negara demokrasi yang pemerintahannya berbentuk republik parlementer yang mana kepala negaranya dipegang oleh presiden dan kepala pemerintahanya dipegang oleh perdana menteri. Sedikit berbeda dengan indonesia untuk pemilihan presiden di singapura dipilih oleh rakyat langsung setiap enam tahun sekali. Terkait dengan partai di singapura menggunakan sistem multipartai sama halnya dengan indonesia.<sup>8</sup> Sama dengan indonesia singapura juga terdapat tiga kekuasaan yaitu :

1. Badan Eksekutif di Singapura

Badan Esekutif di Singapura berada ditangan perdana menteri yang ditunjuk oleh presiden. Perdana menteri disini memimpin kabinet secara tanggung jawab dan juga kolektif kepada parlemen. Presiden akan mengangkat menteri dengan rekomendasi dari perdana menteri.

2. Badan Legislatif di Singapura

Badan legislatif di Singapura berada ditangan parlemen singapura dengan presiden sebagai kepala. Tugas parlemen legislatif singapura yaitu mengundang undang-undang yang mengatur negara.

3. Badan Yudikatif di Singapura

Kekuasaan penuh peradilan dilaksanakan oleh mahkamah angung serta peradilan dibawahnya oleh konstitusi singapura. Pengadilan terdiri dari dua yaitu peradilan banding dan peradilan tinggi.

AbdulRani Usman. "Komunikasi Politik Singapura." *At-Tanzir: Jurnal Prodi Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 11, no. 2 (2020): 269–80.

Ahmad Yani. *System Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teri Dan Praktik Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945*. Vol. 12. 2 vol. 2018, t.t.

Asto Tetepa. "Indonesia Singapura,," t.t.

[https://Www.Academia.Edu/11922957/Indonesia\\_Singapura](https://Www.Academia.Edu/11922957/Indonesia_Singapura).

Dr. rer.pol. Mada Sukmajati, dan Muhammad Mahsum. *Metodelogi Perbandingan Pemerintahan,* t.t.

Ryane Jasmine. "Sistem Pemerintahan Singapura," t.t.

[https://www.academia.edu/17760740/sistem\\_pemerintahan\\_singapura](https://www.academia.edu/17760740/sistem_pemerintahan_singapura).

Sunarto. "Prinsip cheks and balances dalam system ketatanegaraan Indonesia, masalah-masalah hukum,," t.t. <https://doi.org/10.14710/mmh.45.2.2016.175-16>.